

# LAPORAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 PROVINSI ACEH



# LAPORAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 PROVINSI ACEH





**Pengarah:**

Rudi S. Prawiradinata

**Penanggung Jawab:**

Agustin Arry Yanna

**Tim Pelaksana:**

Yudhie Hatmadji Sudjarwo

Novi Mulia Ayu

Andi Setyo Pambudi

Dwi Ratih Suryantining Esti

Ika Widyawati

Yulia Agnis Sutarno

Grace Second Lady Manalu

Rahmat Hidayat

Andreas Rudika Ardiyanto

Amelia Ari Putri

**Staf Pendukung:**

Fahmi Rohman Bimantoro

Jovany Aliflyantera Adistana

Dewi Nurlina

Aisah

Asri Abidatilah

M. Yusuf Zaky Amanullah

Aulia Rachma Pramudya

**Informasi selanjutnya, hubungi:**

Direktorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD),

Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian PPN/Bappenas

e-mail: [dit.peppd@bappenas.go.id](mailto:dit.peppd@bappenas.go.id)

## KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu tahapan penting dalam perencanaan adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Peran evaluasi diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Hasil evaluasi akan menjadi masukan bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan.

Untuk memberikan informasi pembangunan daerah, Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah melaksanakan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD). Salah satu cakupan EPD adalah melakukan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di 34 Provinsi. Laporan ini merupakan *series* laporan EKPD 34 Provinsi yang berfokus pada evaluasi *on-going* pencapaian kinerja utama daerah tahun 2022 yang berdasarkan pada kerangka RKP 2022. Laporan EKPD tahun 2022 mencakup informasi pencapaian sasaran pengembangan wilayah, identifikasi faktor pendukung, dan pembelajaran di daerah terpilih. Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 hingga saat ini berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan.

Sebagai penutup, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusunan laporan evaluasi ini. Kami menyadari bahwa laporan masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Oleh sebab itu, masukan dan saran yang membangun dari pengguna hasil evaluasi, sangat kami harapkan agar tujuan evaluasi dapat tercapai.

Jakarta, 30 Desember 2022  
Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan  
Pengendalian Pembangunan Daerah,



**Agustin Arry Yanna**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
GLOSARIUM .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan .....	3
1.3. Hasil yang Diharapkan.....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.4. Batasan Evaluasi.....	3
BAB II METODE EVALUASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN .....	9
2.1. Metode Pengumpulan Data .....	9
2.2. Metode Analisis .....	10
2.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan .....	15
BAB III HASIL EVALUASI.....	19
3. 1. Gambaran Capaian Makro Daerah .....	19
3. 2. Skoring Kinerja Pencapaian .....	33
3. 3. Analisis Faktor Pendukung.....	34
3. 4. Hasil Skoring Faktor Pendukung .....	38
3. 5. Analisis Deskriptif Dukungan Daerah .....	39
3. 6. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	39
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	43
4. 1 Kesimpulan .....	43
4. 2 Rekomendasi .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Prioritas RKP Tahun 2022.....	2
Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir EKPD.....	2
Gambar 1.3 Ruang Lingkup Evaluasi.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Cakupan EKPD .....	11
Gambar 2.2 Tahapan Kegiatan Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah .....	15
Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 2017 – 2021 (Persen) .....	19
Gambar 3. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2022 (Persen, c- to-c) .....	20
Gambar 3. 3 Struktur dan Pertumbuhan PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan III- 2022 .....	22
Gambar 3. 4 Struktur dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh berdasarkan Pengeluaran Triwulan III-2022 .....	23
Gambar 3.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2017 – 2022 .....	24
Gambar 3.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh tahun 2017 – 2022 ...	24
Gambar 3.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2021.....	26
Gambar 3.8 Rasio Gini Provinsi Aceh tahun 2017 – 2022.....	27
Gambar 3.9 Perkembangan TPT Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2022 (Persen) .....	28
Gambar 3.10 Perkembangan Jumlah Penganggur Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2022 (Ribu Orang) .....	29
Gambar 3.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kota Provinsi Aceh Tahun 2022 (Persen) .....	30
Gambar 3.12 Perkembangan IPM Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2022 .....	30
Gambar 3.13 Pencapaian IPM Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 .....	32

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data yang digunakan dalam analisis .....	9
Tabel 2.2 Kriteria Skoring Capaian Kinerja .....	12
Tabel 2.3 Indikator Faktor Pendukung EKPD 2022 .....	13
Tabel 2. 4 Pengelompokan Skoring Faktor Pendukung .....	14
Tabel 3.1 Komponen Pendukung IPM .....	31
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Provinsi Aceh terhadap Target RKP 2022.....	33
Tabel 3.3 Skor Komponen Sumber Daya Daerah .....	34
Tabel 3.4 Skor Komponen Partisipasi <i>Stakeholders</i> .....	36
Tabel 3.5 Skor Komponen Kelembagaan dan Tata Kelola Daerah Provinsi Aceh .....	37
Tabel 3.6 Agregasi Skoring Indikator Faktor Pendukung Provinsi Aceh .....	38



## GLOSARIUM

<i>Adequate Disclosures</i>	: Kecukupan Pengungkapan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	: Bank Indonesia
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
COVID-19	: Jenis virus dari Coronavirus disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan teridentifikasi pada tahun 2019
Daring	: Dalam jaringan; Terhubung dengan jejaring komputer, internet, dan sebagainya
DAU	: Dana Alokasi Umum
EKPD	: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
HBKN	: Hari Besar Keagamaan Nasional
<i>Herd Immunity</i>	: Sejumlah besar populasi di sebuah area, kebal terhadap penyakit tertentu
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
IDD	: Indeks Demokrasi Daerah
IDSD	: Indeks Daya Saing Daerah
IKFD	: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
IKM	: Industri Kecil dan Menengah
IKTL	: Indeks Kualitas Tutupan lahan
IKRT	: Industri Kecil dan Rumah Tangga
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPP	: Indeks Pembangunan Pemuda
IRB	: Indeks Reformasi Birokrasi
IRBI	: Indeks Risiko Bencana Indonesia
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional

KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KFD	: Kapasitas Fiskal Daerah
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
K/L	: Kementerian/Lembaga
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPBPB	: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Kuratif	: Mempunyai daya untuk mengobati atau menjadi solusi
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LNPRT	: Lembaga <i>NonProfit</i> yang Melayani Rumah Tangga
LPE	: Laju Pertumbuhan Ekonomi
Luring	: Luar Jaringan; Terputus dari jejaring komputer, internet, dan sebagainya
Menteri PPN	: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
<i>Mixed Method</i>	: Campuran metode; Terdiri dari beberapa metode
MP	: <i>Major Project</i>
MRO	: <i>Maintenance, Repair, and Overhaul</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Daerah
PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
PN	: Prioritas Nasional
PP	: Peraturan Pemerintah
PSN	: Proyek Strategis Nasional
RI	: Republik Indonesia
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SCM	: <i>Success Case Method</i>

SD	: Sekolah Dasar
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SK	: Surat Keputusan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
THIS	: Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
TK	: Tingkat Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UHH	: Umur Harapan Hidup
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang



# BAB I

# Pendahuluan



**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi menjadi salah satu dari empat tahapan utama dalam proses pembangunan nasional. Adapun keempat tahapan tersebut meliputi (1) penyusunan; (2) penetapan; (3) pengendalian dan perencanaan; serta (4) evaluasi pelaksanaan perencanaan. Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional. Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, sebagai pembelajaran (lesson learned) bagi perbaikan kebijakan pembangunan pada tahap berikutnya. Peran strategis evaluasi dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan melakukan evaluasi kebijakan pada tahun berjalan dalam rangka untuk menentukan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

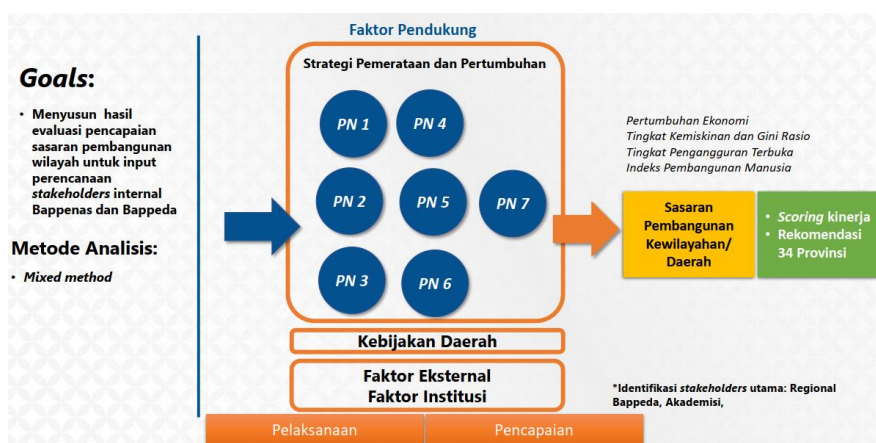
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan semestinya tidak hanya mencakup atas kebijakan dalam perencanaan pusat, namun juga kebijakan dalam perencanaan daerah yang mendukung pembangunan nasional. Adanya pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) juga menguatkan prinsip bahwa kontribusi pembangunan daerah sangat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam dokumen RKP 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 serta Pemutakhiran RKP 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021, terdapat strategi pengembangan wilayah dan Prioritas Nasional 2 yaitu “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”. Substansi tersebut erat kaitannya dengan pembangunan daerah, dimana dalam implementasinya membutuhkan sinkronisasi intervensi pembangunan baik pusat maupun daerah untuk mencapai sasaran pembangunan kewilayahan dan sasaran Prioritas Nasional dalam RKP tersebut.

Gambar 1. 1 Prioritas RKP Tahun 2022



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir EKPD 2022



Pelaksanaan kegiatan EKPD di 34 Provinsi ini menekankan pada: (1) evaluasi *on-going* pencapaian sasaran pengembangan wilayah RKP 2022 di 34 provinsi; (2) identifikasi faktor pendukung/penghambat pencapaian sasaran; (3) pembelajaran daerah; dan (4) identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Pada tahun 2022, kami sedang mengembangkan scoring kinerja daerah. Scoring ini akan fokus pada aspek pencapaian daerah berdasarkan capaian indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan, dan indeks pembangunan manusia. Selain itu, sebagai pisau analisis scoring, faktor pendukung yang dikembangkan yaitu faktor modalitas daerah dan faktor pelaksanaan rencana pembangunan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi *evidence-based* sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap program/kegiatan yang sedang berjalan. Selain itu, hasil evaluasi diharapkan dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan yang akan digunakan sebagai bahan masukan dan tindaklanjut perencanaan (rekomendasi perbaikan kebijakan dan permasalahan pembangunan).



## 1.2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan EKPDP 34 Provinsi tahun 2021 yaitu untuk:

1. Evaluasi *on-going* pencapaiann pencapaian sasaran RKP kewilayahan tahun 2022 di 34 provinsi;
2. Identifikasi faktor pendukung/penghambat pencapaian sasaran;
3. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah; dan
4. Pembelajaran daerah

## 1.3. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan (*output*) dari pelaksanaan EKPDP 34 Provinsi adalah tersusunnya laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang diperkuat dengan analisis mendalam dan identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

## 1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup EKPDP dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3 Ruang Lingkup Evaluasi



Ruang lingkup substansi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 34 provinsi menekankan pada evaluasi *on-going* ketercapaian sasaran PN Kewilayahan, pelaksanaan dukungan daerah di 34 provinsi dan identifikasi isu strategis daerah. Evaluasi pencapaian ini diharapkan dapat memberikan informasi mendalam terhadap penyebab fakta *gap* yang terjadi serta identifikasi faktor yang memengaruhi hasil pencapaian tersebut secara kualitatif. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam proses penyusunan perencanaan tahun selanjutnya.

## 1.4. Batasan Evaluasi

Pelaksanaan EKPDP 34 provinsi tahun 2022 memiliki batasan dalam evaluasi yaitu:

- 1) **Pendekatan evaluasi.** Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPDP) tidak lagi dilakukan melalui pendekatan *ex-post*, namun melalui pendekatan evaluasi *on-going*. Identifikasi pencapaian pada tahun 2022 akan lebih menggambarkan kondisi pembangunan terkini.

- 2) **Pengumpulan data.** Pengumpulan data dan informasi lebih banyak dilakukan secara studi pustaka, kolaborasi dengan beberapa instansi dan dalam jaringan (daring). Diskusi terfokus dilakukan secara daring bersama pemerintah daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda), dan akademisi pada daerah terpilih. Selain itu, pengumpulan data dan informasi juga dilakukan melalui kuesioner yang disampaikan kepada Bappeda 34 Provinsi.
- 3) **Cakupan evaluasi.** Cakupan evaluasi berfokus pada pencapaian *on-going* dan faktor pendukung/penghambat pencapaian sasaran pengembangan wilayah RKP 2022 di 34 Provinsi. Faktor pendukung atau penghambat yang akan diidentifikasi meliputi kebijakan pendukung, faktor institusi dan eksternal. Selain itu, pada laporan ini akan membahas pembelajaran dari tujuh daerah terpilih dan menggali *lesson learned* daerah dalam mencapai sasaran pembangunan.
- 4) **Ketersediaan data.** Tantangan dalam pelaksanaan evaluasi yaitu ketersediaan data pada triwulan III dan belum optimalnya respons daerah terhadap kuesioner menyebabkan informasi yang didapatkan cukup terbatas.

**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**





Evaluasi Kinerja  
Pembangunan  
Daerah 2022

## **BAB II**

# **Metode Evaluasi dan Mekanisme Pelaksanaan**



**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**

## BAB II

### METODE EVALUASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN

#### 2.1. Metode Pengumpulan Data

Evaluasi dalam EKPD 34 Provinsi Tahun 2022 dilakukan dengan *mixed method* kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif terdiri dari penyusunan skoring capaian kinerja pembangunan dan skoring faktor pendukung, sementara analisis kualitatif terdiri dari analisis dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian/Lembaga, maupun data dari masing-masing pemerintah daerah sampel. Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan kombinasi analisis data sekunder, literature review terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta data primer dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan dilakukan di 7 wilayah terpilih.

**Tabel 2.1 Data yang digunakan dalam analisis**

Metode	Data	Sumber
<b>Skoring Capaian Kinerja</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi	BPS
	Tingkat Kemiskinan	BPS
	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS
	Rasio Gini	BPS
	Indeks Pembangunan Manusia	BPS
<b>Skoring Faktor Pendukung</b>	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	KLHK
	Proporsi PDRB Sektor Primer	BPS
	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BNPB
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	BPS
	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	BPS
	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	BRIN
	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu atau pilkada terakhir	KPU
	Partisipasi Sosial	BPS
	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (IPP) - % Perbandingan dengan Nasional	BPS



Metode	Data	Sumber
	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (IPP) - % Perbandingan dengan Nasional	BPS
	Realisasi Penanaman Modal (PMA & PMDN)	BKPM
	Pertumbuhan PMA dan PDMN	BKPM
	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran APBD	Kemenkeu
	Rasio PAD terhadap PDRB ( <i>Local Tax Ratio</i> )	Kemenkeu
	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Kemenkeu
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Kemenpan RB
	Opini BPK atas LKPD	BPK
	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Ombudsman RI

Sumber: Penulis

## 2.2. Metode Analisis

Kegiatan EKPD tahun 2022 diarahkan untuk memenuhi tiga tujuan spesifik, yaitu: (1) mengevaluasi pencapaian sasaran RKP Kewilayahan tahun 2022 di 34 provinsi, (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan kewilayahan, dan (3) mengidentifikasi isu strategis di 34 provinsi. Secara umum, kegiatan EKPD tahun 2022 menggunakan *mixed methods* dengan sejumlah metode evaluasi dan analisis antara lain: *Gap Analysis* dan Skoring, dan Analisis Deskriptif.

Berikut adalah uraian mengenai metode analisis EKPD 34 provinsi.

### 2.2.1. *Gap Analysis* dan Skoring Capaian Kinerja

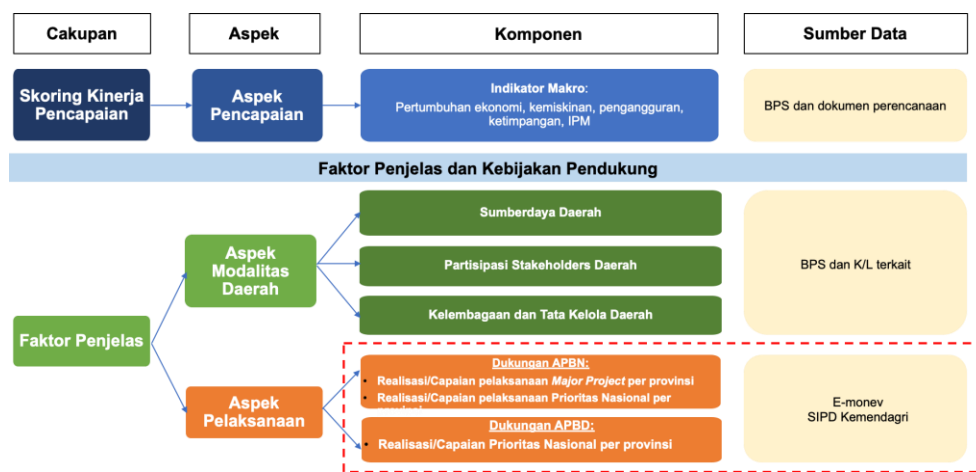
Metode *gap analysis* digunakan untuk melakukan evaluasi pengukuran kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Metode ini membandingkan antara realisasi capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan sasaran kinerja (apa yang ingin dicapai). Perbedaan antara realisasi capaian dengan sasaran menjadi sumber adanya *gap* antara hasil yang sudah dicapai dengan yang direncanakan, atau kondisi yang terealisasi dengan kondisi yang seharusnya.

Pada EKPD tahun 2022 ini, *gap analysis* dilakukan dengan metode analisis berbasis skoring terhadap capaian kinerja pembangunan dan faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi skor (faktor pendukung). Gambar di bawah menunjukkan kerangka logis



analisis skoring capaian kinerja pembangunan. Dalam menilai EKPD secara kuantitatif, dilakukan metode skoring terhadap realisasi capaian atas 5 (lima) indikator makro yang merupakan sasaran pembangunan kewilayahan (Laju Pertumbuhan, Kemiskinan, Pengangguran, Ketimpangan, dan IPM). Selanjutnya, evaluasi ini juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja yang dibagi ke dalam dua aspek: aspek modalitas daerah dan aspek pelaksanaan. Analisis faktor pendukung ini digunakan sebagai basis dalam menjelaskan hasil skoring kinerja pencapaian dari sisi modalitas daerah dan kebijakan, sehingga keunikan setiap daerah dapat tergambar dari faktor tersebut.

**Gambar 2. 1 Kerangka Cakupan EKPD**



Sumber: Penulis

Indikator makro terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan (TK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rasio Gini (RG), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk tiap-tiap provinsi  $i$  dan kombinasi indikator-sasaran  $j^1$ , nilai capaian perbandingan antara realisasi dengan target RKP dan RKPD dihitung dengan formula sebagai berikut:

Indikator dengan arah positif (LPE dan IPM)	:	$Capaian_{ij} = \frac{[Target_{ij} - (Target_{ij} - Realisasi_{ij})]}{Target_{ij}}$
Indikator dengan arah negatif (TK, TPT, dan RG)	:	$Capaian_{ij} = \frac{[Target_{ij} - (Realisasi_{ij} - Target_{ij})]}{Target_{ij}}$

<sup>1</sup> Terdapat 13 kombinasi indikator-sasaran, yaitu LPE-RKP, TK-RKP, TPT-RKP, LPE-RKPD, TK-RKPD, TPT-RKPD, RG-RKPD, IPM-RKPD, LPE-2021, TK-2021, TPT-2021, RG-2021, dan IPM-2021.

Sementara itu, untuk menghitung nilai capaian perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan 2021, digunakan formula sebagai berikut:

Indikator dengan arah positif (LPE dan IPM)	:	$Capaian_{ij} = \frac{Realisasi\_2022_{ij} - Realisasi\_2021_{ij}}{Realisasi\_2021_{ij}}$
Indikator dengan arah negatif (TK, TPT, dan RG)	:	$Capaian_{ij} = -1 * \frac{Realisasi\_2022_{ij} - Realisasi\_2021_{ij}}{Realisasi\_2021_{ij}}$

Selanjutnya, *gap analysis* dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian masing-masing indikator berdasarkan data termutakhir dengan tiga nilai pembanding, yaitu (1) target RKP 2022, (2) target RKPD 2022, dan (3) realisasi tahun 2021. Hasil perbandingan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori skor (Merah, Kuning, Hijau). Untuk perbandingan dengan angka pembanding target RKP dan RKPD, kriteria yang digunakan mengacu pada kriteria dalam Laporan Evaluasi RKP oleh Direktorat PEPPS Bappenas. Sementara itu, untuk perbandingan dengan realisasi tahun 2021, penentuan skor dilakukan berdasarkan distribusi data selisih realisasi tahun 2022 dan 2021. Langkah pertama adalah menghitung selisih antara capaian indikator tahun 2022 dan 2021. Langkah selanjutnya adalah menghitung rentang (*range*) dari nilai selisih untuk tiap-tiap indikator dan membagi nilai rentang tersebut dengan 3 untuk mendapatkan titik potong (*cutoff points*) yang membagi rentang ke dalam tiga bagian. Provinsi dengan nilai selisih di bawah titik potong pertama (nilai minimum + rentang / 3) mendapatkan skor 1. Provinsi dengan nilai selisih antara titik potong pertama dan kedua (nilai maksimum – rentang / 3) mendapatkan skor 2. Provinsi dengan nilai selisih di atas titik potong kedua mendapatkan skor 3. Kriteria skoring untuk masing-masing angka pembanding secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2 Kriteria Skoring Capaian Kinerja**

Angka Pembanding	Kriteria Skor Indikator		
	1 (Merah) Kategori kinerja kurang (target sulit tercapai)	2 (Kuning) Kategori kinerja cukup (perlu kerja keras untuk mencapai target)	3 (Hijau) Kategori kinerja baik ( <i>on track</i> mencapai target)
Target RKP 2022	Capaian <60% dari Target	Capaian antara ≥ 60% dan <90% dari Target	Capaian ≥ 90% dari Target
Target RKPD 2022	Capaian <60% dari Target	Capaian antara ≥ 60% dan <90% dari Target	Capaian ≥ 90% dari Target

Angka Pemandangan	Kriteria Skor Indikator		
	1 (Merah) Kategori kinerja kurang (target sulit tercapai)	2 (Kuning) Kategori kinerja cukup (perlu kerja keras untuk mencapai target)	3 (Hijau) Kategori kinerja baik ( <i>on track</i> mencapai target)
Realisasi Tahun 2021	Selisih < $(\min + (\text{range}/3))$	$(\min + (\text{range}/3)) \leq$ Selisih < $(\max - (\text{range}/3))$	Selisih $\geq (\max - (\text{range}/3))$

Catatan: *Cutoff points* untuk perbandingan dengan target RKP dan RKPD mengacu pada Laporan Evaluasi RKP dari Direktorat PEPPS Bappenas. *Cutoff points* untuk perbandingan dengan realisasi tahun 2021 berdasarkan distribusi data.

Untuk membantu menganalisis capaian kinerja di atas, EKPD tahun 2022 melakukan skoring terhadap 18 indikator yang diidentifikasi sebagai faktor pendukung. Skoring terhadap faktor-faktor pendukung dihitung dengan metode skor komposit. Pemilihan indikator berbasis landasan teori mengenai pertumbuhan endogen, studi literatur, dan masukan dari akademisi dan lembaga pemerintahan. Beberapa indikator sudah memiliki metode skoring dan pembagian masing-masing pada peraturan teknisnya. Namun untuk skoring indikator yang belum memiliki aturan, dilakukan dengan melihat distribusi datanya. Tabel dibawah menunjukkan secara lebih rinci kriteria skoring faktor pendukung.

**Tabel 2.3 Indikator Faktor Pendukung EKPD 2022**

No	Komponen	Dimensi	Indikator	Sumber	Tahun
1	Sumber Daya Daerah	Geografis & Sumber Daya Alam (Geografis)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	KLHK	2021
2			Proporsi PDRB Sektor Primer	BPS	2021
3			Indeks Risiko Bencana (IRBI)	BPS	2021
4		Sosial Budaya (Sosbud)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	BPS	2018
5			Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	BPS	2021
6			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	BPS	2021
7	Partisipasi Stakeholders	Partisipasi	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019	KPU	2021
8			Indeks Kebahagiaan	BPS	2022
9			Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (IPP) - % Perbandingan dengan Nasional	BPS	2022
10			Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (IPP) - % Perbandingan dengan Nasional	BPS	2022
11		Investasi	Realisasi Penanaman Modal (PMA & PMDN)	BKPM	2022

No	Komponen	Dimensi	Indikator	Sumber	Tahun
12			Pertumbuhan PMA dan PDMN	BKPM	2022
13	Kelembagaan dan Tata Kelola	Fiskal	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran APBD	Kemenkeu	2021
14			Rasio PAD terhadap PDRB (Tax Ratio)	Kemenkeu	2021
15			Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Kemenkeu	2021
16		Institusi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	BPS	2021
17			Opini BPK atas LKPD	BPK	2021
18			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Ombudsman RI	2021

Sumber: Penulis

Langkah selanjutnya yaitu, melakukan normalisasi. Indikator faktor pendukung memiliki satuan dan rentang yang bervariasi, maka perlu dilakukan normalisasi atas 18 indikator tersebut. Metode normalisasi yang digunakan adalah *min-max normalization*. Setelah normalisasi, nilai masing-masing indikator berada di rentang 0-1. Terdapat dua indikator dengan arah hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100 ribu Penduduk. Semakin tinggi nilai dua indikator tersebut di suatu daerah, maka semakin tidak kondusif perekonomian daerah tersebut untuk tumbuh sehingga menghambat pencapaian target kinerja makro daerah. Untuk itu, dilakukan penyesuaian terhadap dua indikator tersebut. Untuk tiap indikator  $X$  di provinsi  $i$ , maka nilai indikator yang sudah dinormalisasi,  $N$ , adalah:

Indikator dengan arah positif : 
$$N_i = \frac{X_i - \min(X_i)}{\max(X_i) - \min(X_i)}$$

Indikator dengan arah negatif : 
$$N_i = 1 - \frac{X_i - \min(X_i)}{\max(X_i) - \min(X_i)}$$

(IRBI dan Risiko Terkena Kejahatan)

Berdasarkan hasil normalisasi dengan metode diatas skoring faktor pendukung akan bernilai antara 0-1. *Grading* warna digunakan untuk membantu visualisasi dan dilakukan dengan membagi skoring ke dalam 5 bagian sama besar. Skor 0 (*grading* warna merah) mengindikasikan capaian faktor pendukung yang paling buruk, sedangkan angka 1 (*grading* warna hijau tua) mengindikasikan capaian faktor pendukung yang paling baik.

**Tabel 2. 4 Pengelompokan Skoring Faktor Pendukung**

Warna	Skor Batas Bawah	Skor Batas Atas
Hijau Tua	0,81	1,00

Warna	Skor Batas Bawah	Skor Batas Atas
Hijau Muda	0,61	0,80
Kuning	0,41	0,60
Oranye	0,21	0,40
Merah	0,00	0,20

Sumber: Hasil penghitungan penulis

Setelah itu, agregasi dilakukan dengan menghitung rata-rata seluruh nilai indikator kemudian dikalikan dengan 100. Agregasi juga dapat dilakukan untuk masing-masing dimensi. Setelah agregasi, skor berada di rentang 0-100.

### 2.2.2. Implementasi Skoring Capaian Kinerja dan Analisis Faktor pendukung

Berdasarkan kerangka logis yang sudah dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka skoring capaian kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung *gap* dengan membandingkan realisasi capaian indikator makro dengan target RKP 2022, target RKPD 2022, dan realisasi tahun 2021.
2. Memberikan skor terhadap *gap* capaian indikator makro berdasarkan kriteria skoring yang sudah ditetapkan.
3. Memberikan skor terhadap faktor-faktor pendukung berdasarkan kriteria skoring yang sudah ditetapkan.
4. Menganalisis hasil skoring capaian kinerja dan skoring faktor pendukung untuk mengidentifikasi keterkaitan antara keduanya.

### 2.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan EKPD tahun 2022 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat dan daerah seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan akademisi. Diagram di bawah memperlihatkan tahapan pelaksanaan EKPD tahun 2022.

**Gambar 2.2 Tahapan Kegiatan Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah**





Evaluasi Kinerja  
Pembangunan  
Daerah 2022

# BAB III

## Hasil Evaluasi





**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**



## BAB III

### HASIL EVALUASI

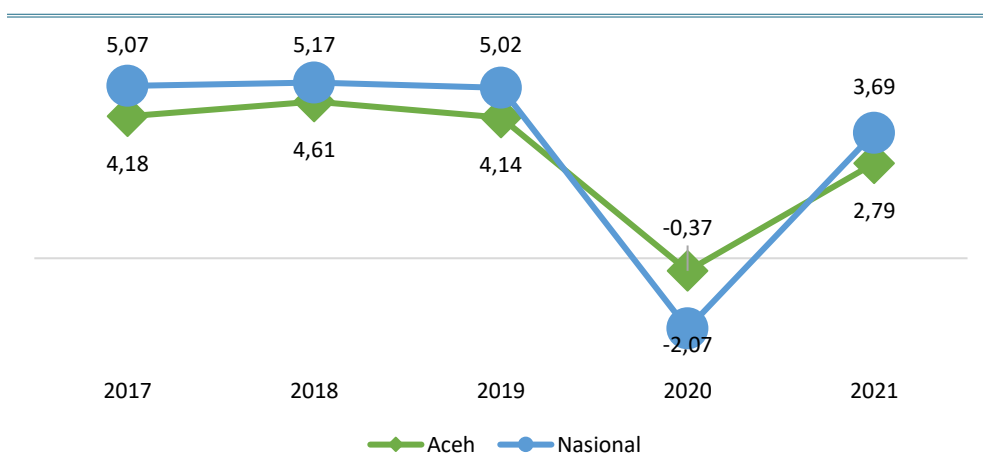
#### 3. 1. Gambaran Capaian Makro Daerah

##### 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dalam perkembangannya selama periode 2017 hingga 2021 cukup fluktuatif. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh harus mengalami penurunan menjadi sebesar 4,14 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi selama 2017 hingga 2018 yang terus menunjukkan tren yang positif. Perlambatan pada tahun 2019 salah satunya diakibatkan dari penurunan kinerja lapangan usaha industri pengolahan yang mengalami penurunan sebesar 0,05 poin persentase. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2019, kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2020 harus terpukul akibat pandemi Covid-19 yang melanda. Selama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,37 persen atau turun sebesar 3,77 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari kinerjanya selama rentang periode 2017 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selalu berada di bawah capaian nasional. Namun capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama tahun 2020 justru menunjukkan kinerja yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi lebih dalam sebesar 2,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama tahun 2021 menunjukkan tren kinerja yang membaik. Kendati mengalami kinerja yang positif, namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh masih lebih rendah dibandingkan kinerja nasional yang tumbuh lebih baik sebesar 3,69 persen. Perbaikan kinerja pada tahun 2021 merupakan cerminan kondisi ekonomi yang berangsur pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang terus menurun seiring meningkatnya angka vaksinasi Covid-19.

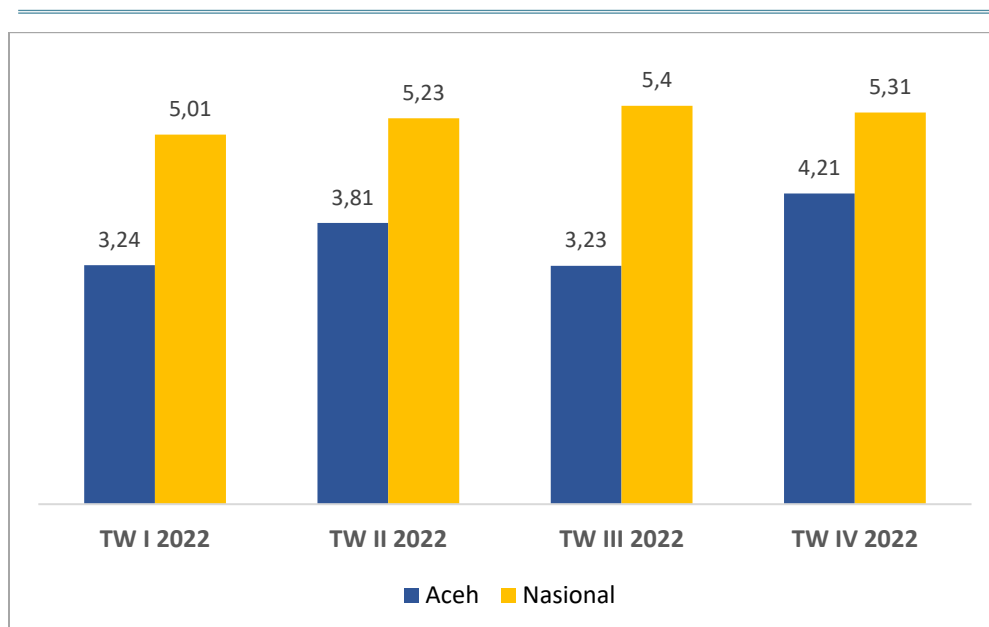
**Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 2017 – 2021 (Persen)**



Sumber: BPS, diolah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama tahun 2022 (c-to-c) tumbuh sebesar 4,21 persen (c-to-c). Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada semester I hingga II tahun 2022 terus menunjukkan kinerja yang meningkat. Meski mengalami tren yang meningkat, namun capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sepanjang tahun 2022 berada lebih rendah dibandingkan capaian ekonomi nasional yang tumbuh lebih tinggi. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,31 persen atau 1,1 poin persentase lebih tinggi dibandingkan LPE Provinsi Aceh. Tren positif ekonomi Aceh didorong oleh kinerja 15 lapangan usaha yang tumbuh positif khususnya kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 40 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 20,83 persen.

**Gambar 3. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2022 (Persen, c-to-c)**



Sumber: BPS, diolah

Jika dilihat dari distribusi lapangan usaha (LU) pada tahun 2022, secara umum struktur ekonomi di Provinsi Aceh masih didominasi oleh sektor primer. Tiga lapangan usaha yang memiliki distribusi lapangan usaha terbesar di Provinsi Aceh yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (29,43 persen), Perdagangan Besar dan Eceran (13,87 persen), serta Pertambangan dan Penggalian (9,99 persen). Dari ketiga lapangan usaha tersebut, dibandingkan periode yang sama tahun 2021 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran mengalami penurunan nilai *share* dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh dibandingkan dengan tahun 2021. Sebaliknya LU Pertambangan dan Penggalian mengalami kenaikan proporsi sektoral dalam PDRB Aceh.

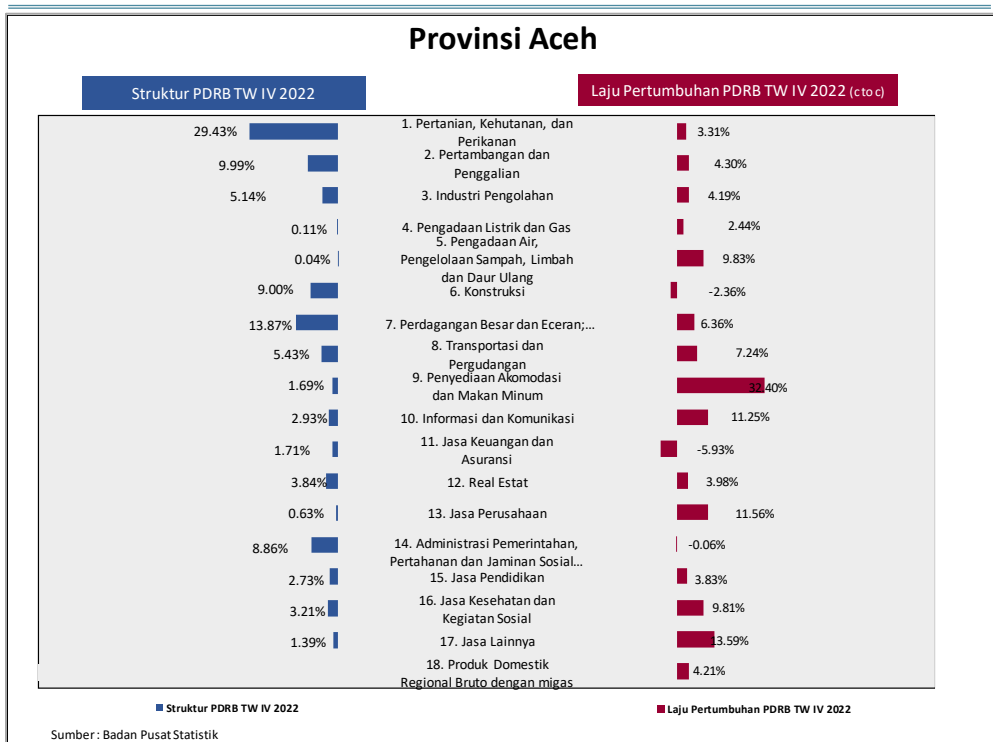
Kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persentase selama kurun waktu satu tahun terakhir. Sebaliknya, pada periode yang sama lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian justru mengalami kenaikan komposisi pada struktur PDRB Provinsi Aceh yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,34 poin persentase. Kenaikan *share* LU Pertambangan dan Penggalian tidak terlepas dari semakin meningkatnya produksi komoditas migas dan batu bara efek dari penghapusan kebijakan larangan ekspor batu bara yang telah dicabut dan adanya kegiatan eksplorasi migas baru di wilayah Laut Andaman atau di wilayah utara Kabupaten Pidie Jaya.

Sementara dari capaian kinerja laju pertumbuhan sektoral, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan kinerja pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2022 atau tumbuh sebesar 32,4 persen. Kinerja LU penopang sektor pariwisata tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kendati kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum selama 2 tahun terakhir sempat mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19, pada tahun 2022 mulai menunjukkan adanya gairah pada sektor pariwisata Aceh. Hal ini terlihat pada kenaikan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan jumlah penumpang yang tiba di Provinsi Aceh terutama untuk angkutan udara.

Sedangkan pada LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan walaupun dari sisi distribusi struktur PDRB memiliki *share* yang tertinggi dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya pada tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 3,31 persen. Penurunan kinerja sektor pertanian tidak terlepas dari adanya penurunan kinerja pada sub lapangan usaha tanaman padi. Penurunan kinerja sub tanaman padi terefleksi salah satunya dari adanya penurunan produksi padi selama 2 tahun terakhir. Sepanjang Januari hingga September 2022 menjadi 1,04 juta ton gabah kering giling (GKG) atau menurun dari tahun 2021 yang sebesar 1,15 juta ton GKG dan tahun 2020 yang dapat memproduksi hingga 1,36 juta ton GKG.



**Gambar 3. 3 Struktur dan Pertumbuhan PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan IV-2022**



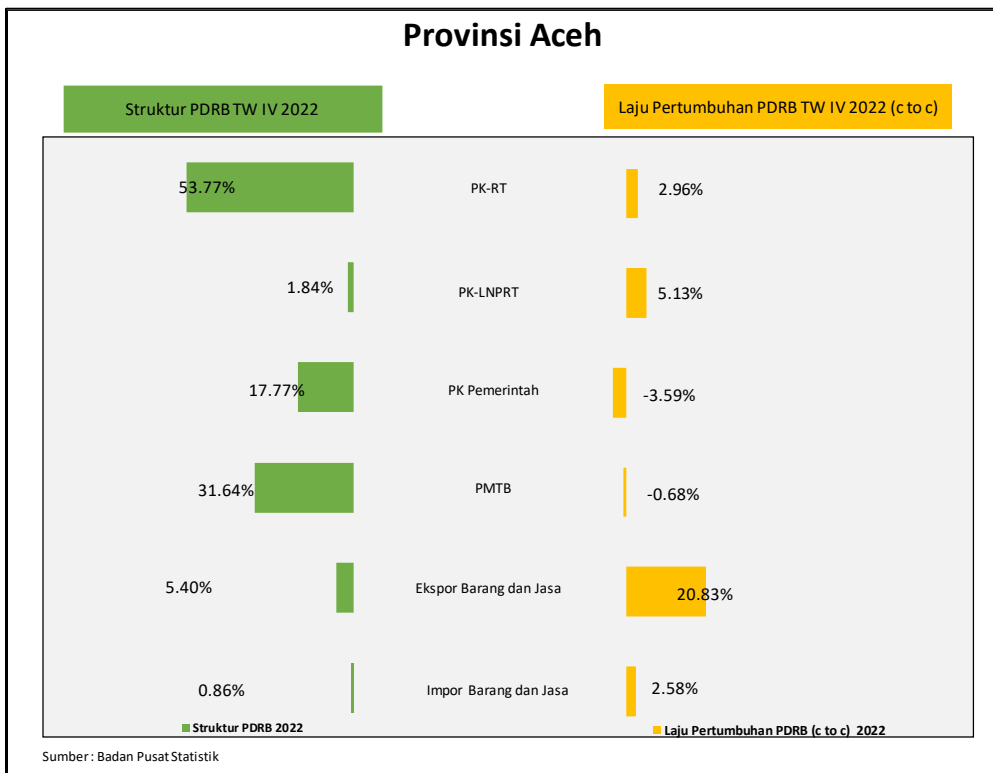
Sumber: BPS, diolah

Struktur PDRB Provinsi Aceh menurut komponen pengeluaran pada tahun 2022, menunjukkan porsi komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dalam perekonomian Provinsi Aceh masih sangat mendominasi dengan komposisi sebesar 53,77 persen atau turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 57,52 persen. Sedangkan komponen Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi komponen dengan *share* terbesar kedua diikuti komponen PK Pemerintah.

Sementara dari laju pertumbuhan berdasarkan komponen pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi. Komponen PK-LNPRT dan PK-RT menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi kedua dan ketiga. Adapun ekspor daerah didorong oleh kinerja komoditas unggulan daerah seperti batu bara dan kopi. Pertumbuhan PDRB pengeluaran yang dilihat dari komponen Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Aceh masih tumbuh positif. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak terlepas dari permintaan agregat yang semakin meningkat seiring semakin banyaknya aktivitas di luar ruangan pasca pandemi Covid-19 serta terdapat beberapa hari besar keagamaan. Berbanding terbalik dengan kinerja komponen Rumah Tangga, kinerja PK

Pemerintah justru tumbuh negatif pada 2022 di angka 3,59 persen. Penurunan konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh serapan realisasi belanja pegawai yang masih rendah.

**Gambar 3. 4 Struktur dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh berdasarkan Pengeluaran Triwulan IV-2022**



Sumber: BPS, diolah

### 3.1.2. Tingkat Kemiskinan

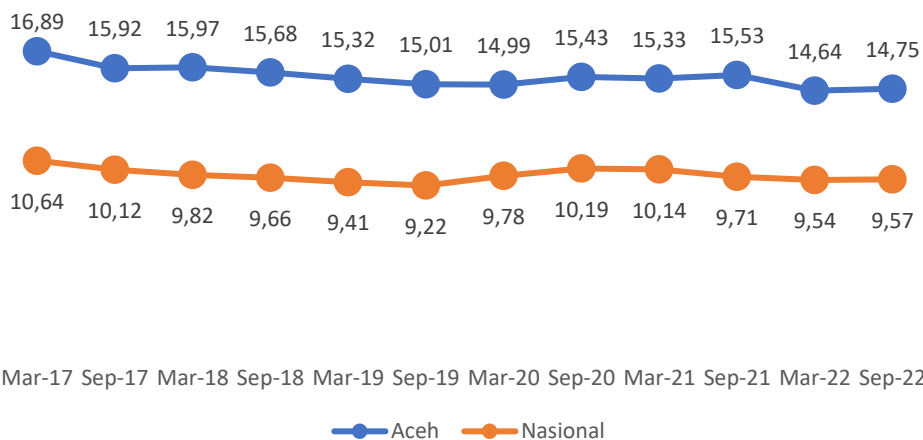
Selama periode tahun 2017 hingga 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami tren yang cenderung menurun. Pada periode September 2017 tingkat kemiskinan di provinsi paling barat Indonesia tersebut sebesar 15,92 persen, sedangkan pada September 2022 turun sebesar 1,17 poin persentase menjadi 14,75 persen atau merupakan capaian tingkat kemiskinan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Sementara capaian pada September 2022 naik dibandingkan periode Maret 2022 yang sebesar 14,64 persen, namun turun dibandingkan periode September 2021 yang sebesar 15,53 persen.

Mulai pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi faktor utama pendorong penurunan angka kemiskinan daerah. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di Provinsi Aceh diantaranya kenaikan jumlah produksi

padi Maret 2022 dan diiringi kenaikan angka Nilai Tukar Petani (NTP) daerah serta penurunan jumlah penganggur secara umum (BPS, 2022).

Secara kewilayahan, capaian tingkat kemiskinan Provinsi Aceh pada September 2022 masih menjadi daerah di wilayah Sumatera yang memiliki angka tingkat kemiskinan tertinggi diatas Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir juga jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-6 dari 34 provinsi. Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Aceh tidak terlepas dari sejarah masa lalu dimana dampak dari konflik bersenjata dan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi pada tahun 2004 lalu. Upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan di Provinsi Aceh dapat dikatakan cukup baik, mengingat sejak tahun 2004 hingga saat ini tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh telah turun 13,84 poin persentase.

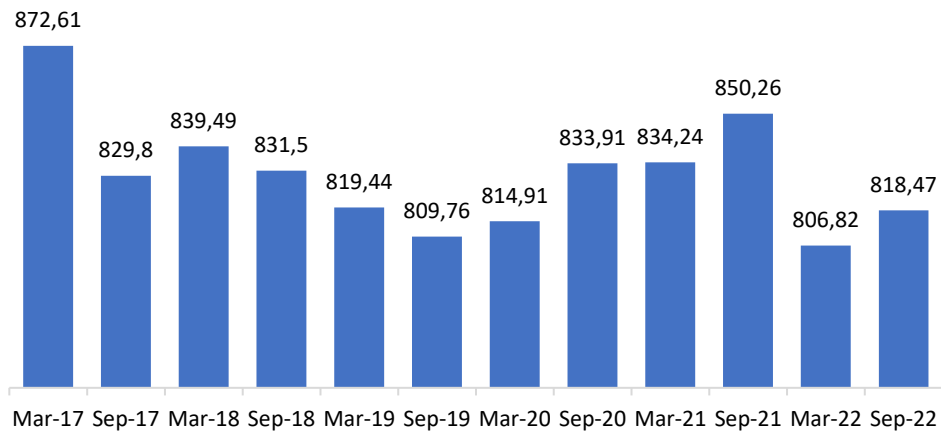
**Gambar 3.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh 2017 – 2022**



Sumber: BPS, diolah

Sejalan dengan indikator tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin pada periode September 2022 turut mengalami peningkatan sebesar 14,64 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2022. Sedangkan dilihat dari jumlahnya, selama periode Maret 2017 hingga September 2022 jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh selalu berada diatas 800 ribu orang. Berdasarkan tempat tinggalnya, pada September 2022 jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh masih didominasi di wilayah perdesaan, yaitu sebanyak 621,52 ribu orang atau menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar 654,79 ribu orang. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang berada di wilayah perkotaan yang hanya sebesar 196,95 ribu orang. Walaupun lebih rendah, angka kemiskinan di daerah perkotaan jika dibandingkan periode yang sama tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,48 ribu orang.

**Gambar 3.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2022**

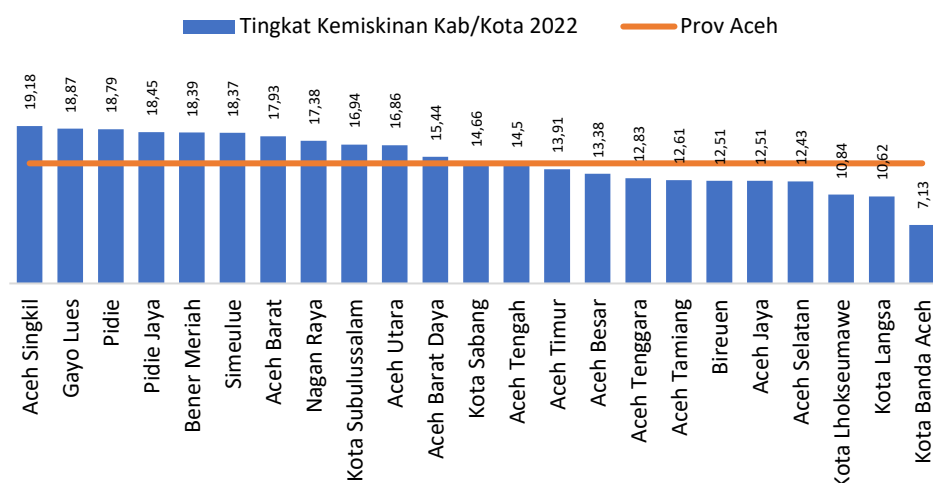


Sumber: BPS, diolah

Tingkat kemiskinan di daerah merupakan agregasi dari jumlah kemiskinan yang ada di kabupaten/kota. Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 19,18 persen atau lebih besar 4,54 poin persentase dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh yang hanya sebesar 14,64 persen. Adapun Kota Banda Aceh menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 7,13 persen. Di Provinsi Aceh sendiri selain Kabupaten Aceh Singkil masih terdapat 12 kabupaten/kota lain yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Sepanjang periode Maret 2021 hingga Maret 2022 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh telah menunjukkan kinerja yang membaik, dimana seluruh daerah mengalami penurunan tingkat kemiskinan.

Peran sektor pariwisata dapat menjadi sektor kunci dan dapat berasosiasi positif dalam mengurangi angka kemiskinan daerah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Aceh bersama pemerintah pusat saat ini berusaha mendapatkan komitmen investasi terkait pengembangan sektor pariwisata. Salah satunya adalah pengembangan wisata halal di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil yang bekerjasama dengan Murban Energy Ltd yang merupakan investor asal Uni Emirat Arab. Adapun total target investasi yang dicapai dalam komitmen tersebut adalah sebesar 500 juta USD atau mencapai Rp7,1 triliun. Investasi tersebut diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi Provinsi Aceh terutama di Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh (Bank Indonesia, 2021).

**Gambar 3.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022**



Sumber: BPS, diolah

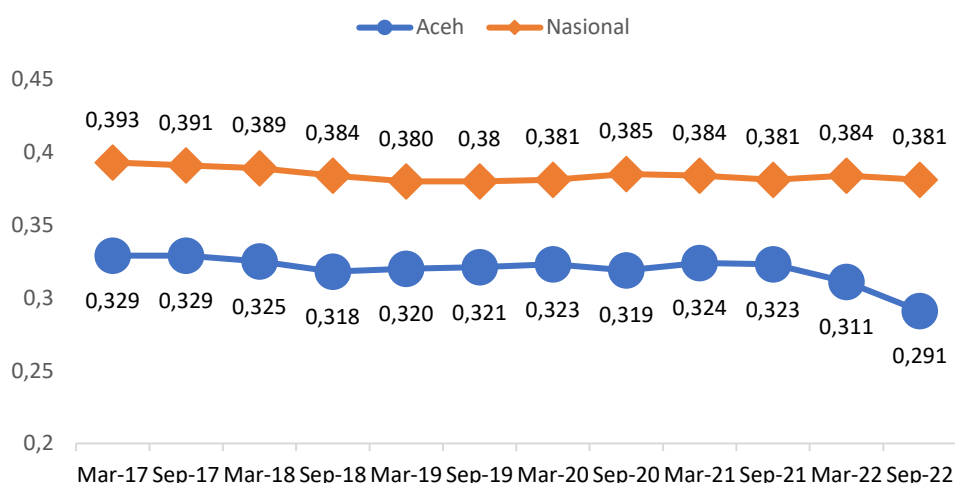
Selain indikator tingkat kemiskinan, dalam mengukur tingkat ketimpangan kelompok pendapatan maka perlu juga melihat berdasarkan indikator rasio gini. Berdasarkan capaian rasio gini di Provinsi Aceh selama periode September 2017 hingga September 2022 menunjukkan tren yang menurun. Sepanjang lima tahun terakhir capaian terbaik rasio gini di Provinsi Aceh adalah periode September 2022 yang sebesar 0,291 atau mengalami penurunan 0,032 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Pada periode September 2022, rasio gini di wilayah perdesaan memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan, yaitu sebesar 0,252 berbanding dengan 0,327. Baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, rasio gini di kedua wilayah tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Di wilayah perdesaan maupun perkotaan rasio gini di daerah tersebut turun sebesar 0,03 poin. Ini menunjukkan adanya indikasi tingkat pemerataan baik di wilayah perkotaan maupun perkotaan di Provinsi Aceh selama satu tahun terakhir mengalami perkembangan yang lebih baik.

Di sisi lain, pencapaian rasio gini Provinsi Aceh pada periode September 2022 masih jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional yang selalu lebih tinggi. Secara nasional, capaian rasio gini Provinsi Aceh juga menjadi yang terendah ke-3 dari 34 provinsi atau mengalami kenaikan peringkat dari posisi 12 di periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara secara kewilayahan, rasio gini Provinsi Aceh merupakan yang terendah kedua atau memiliki capaian rasio gini yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bangka Belitung yang menjadi daerah dengan capaian rasio gini terendah nasional.



Berdasarkan data BPS, merujuk pada data distribusi pengeluaran penduduk di Provinsi Aceh pada periode Maret 2021 hingga Maret 2022 menunjukkan angka persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Aceh sebesar 21,54 persen atau berada pada kategori ketimpangan rendah<sup>2</sup>. Kondisi ketimpangan meningkat jika dibandingkan dengan Maret 2021 yang sebesar 20,67 persen. Berdasarkan daerahnya, di daerah perkotaan pada Maret 2022 angka persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 20,08 persen atau tergolong ketimpangan rendah. Selain itu, angka pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di wilayah perdesaan juga tergolong rendah, yaitu sebesar 23,12 persen.

**Gambar 3.8 Rasio Gini Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2022**



Sumber: BPS, diolah

### 3.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Aceh selama periode Agustus 2017 hingga Agustus 2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada periode Agustus 2022 TPT Provinsi Aceh sebesar 6,17 persen atau menurun sebesar 0,63 poin persentase. Kendati dalam perkembangannya selama periode Agustus 2020 hingga Agustus 2021 capaian TPT Aceh mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan TPT nasional yang memiliki capaian yang lebih tinggi, namun pada Agustus 2022 capaian TPT nasional jauh lebih baik dibandingkan Provinsi Aceh. Berdasarkan sebarannya, daerah perkotaan memiliki TPT

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) – mendefinisikan persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau ukuran ketimpangan Bank Dunia kedalam 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar 12-17 persen, dan ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

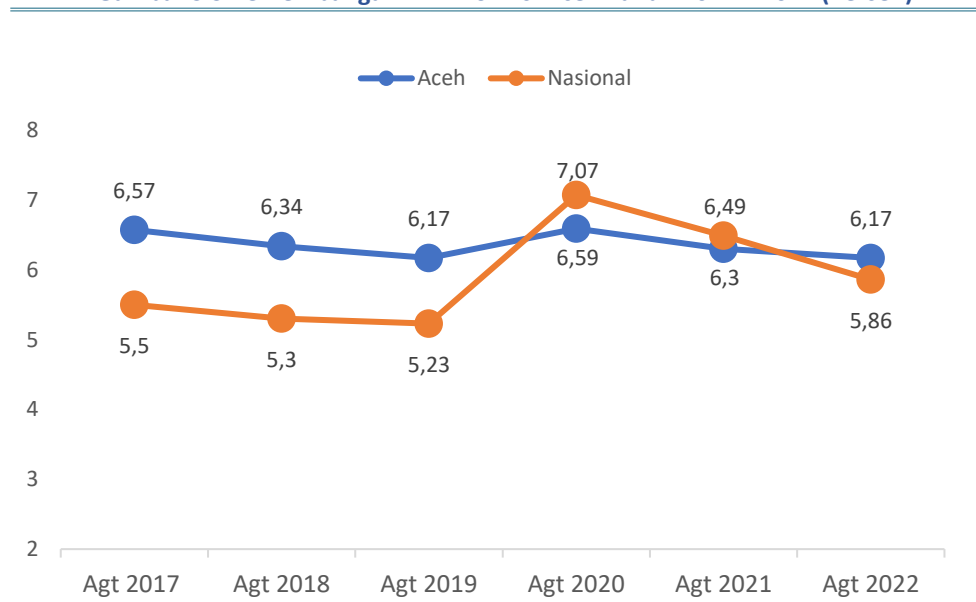


yang jauh lebih tinggi sebesar 8,32 persen dibandingkan dengan TPT perdesaan yang hanya sebesar 5,09 persen. Selama periode Agustus 2021 hingga Agustus 2022, TPT di wilayah perkotaan menunjukkan adanya kenaikan berbanding terbalik dengan kondisi TPT di wilayah perdesaan yang mengalami penurunan.

Penurunan TPT di Provinsi Aceh tidak terlepas dari serapan tenaga kerja di beberapa sektor. Berdasarkan data BPS (2022) jika dilihat lebih dalam berdasarkan penduduk yang bekerja, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi sektor dengan jumlah serapan tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 40,5 persen atau naik jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 36,13 persen. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 13,37 persen atau turun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 16,24 persen, serta sektor Pendidikan sebesar 7,38 persen yang lebih besar dibandingkan sektor Industri Pengolahan yang sebesar 7,32 persen.

Terdapat lima sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja yaitu sektor Pertanian, sektor Konstruksi, sektor Jasa lainnya, sektor Jasa Profesional dan Perusahaan, dan sektor Pertambangan. Sedangkan untuk sektor Perdagangan, sektor Industri Pengolahan, dan sektor Administrasi Pemerintahan menjadi sektor dengan penurunan angka lapangan kerja terbesar. Dilihat dari kegiatannya, kegiatan informal masih mendominasi serapan tenaga kerja di Provinsi Aceh atau sebesar 61,45 persen, lebih besar dibandingkan pekerja di sektor formal yang hanya sebesar 38,55 persen pada tahun 2022. Pada periode Agustus 2022, kategori tamatan pendidikan SMA masih mendominasi TPT di Provinsi Aceh yaitu sebesar 10,1 persen, diikuti tamatan SMK sebesar 7,45 persen, dan tamatan SMP sebesar 5,79 persen.

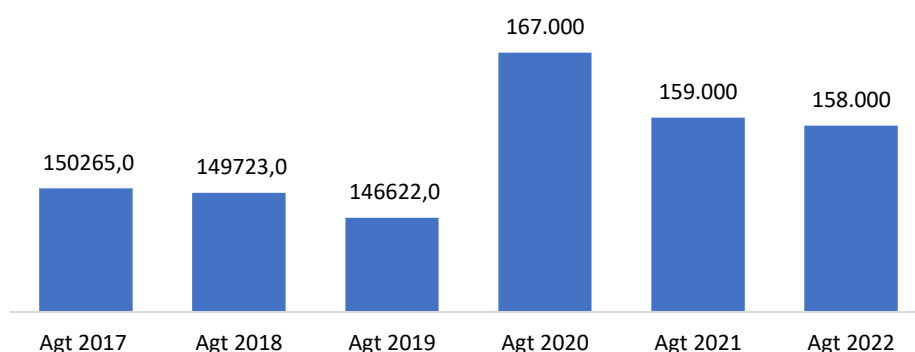
**Gambar 3.9 Perkembangan TPT Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2022 (Persen)**



Sumber: BPS, diolah

Jumlah penganggur di Provinsi Aceh selama periode Agustus 2017 – 2022 sejalan dengan capaian TPT yang fluktuatif, walaupun ada kecenderungan menurun sejak Agustus 2020. Jumlah penduduk yang menganggur pada Agustus 2022 sebanyak 158 ribu orang atau turun dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak 159 ribu orang. Jumlah penduduk yang menganggur di Provinsi Aceh yang menurun selama satu tahun terakhir dapat tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan utama. Selama kurun waktu satu tahun terakhir, dari tujuh jenis status pekerjaan utama hanya dua status penduduk bekerja yang mengalami kenaikan<sup>3</sup>. Kedua pekerjaan utama tersebut diantaranya adalah masyarakat yang berstatus berusaha sendiri, diikuti pekerja keluarga/tidak dibayar. Hal ini bisa mengindikasikan selama masa pandemi Covid-19 ada kecenderungan masyarakat yang kehilangan pekerjaan beralih untuk berwirausaha.

**Gambar 3.10 Perkembangan Jumlah Penganggur Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2022 (Ribu Orang)**



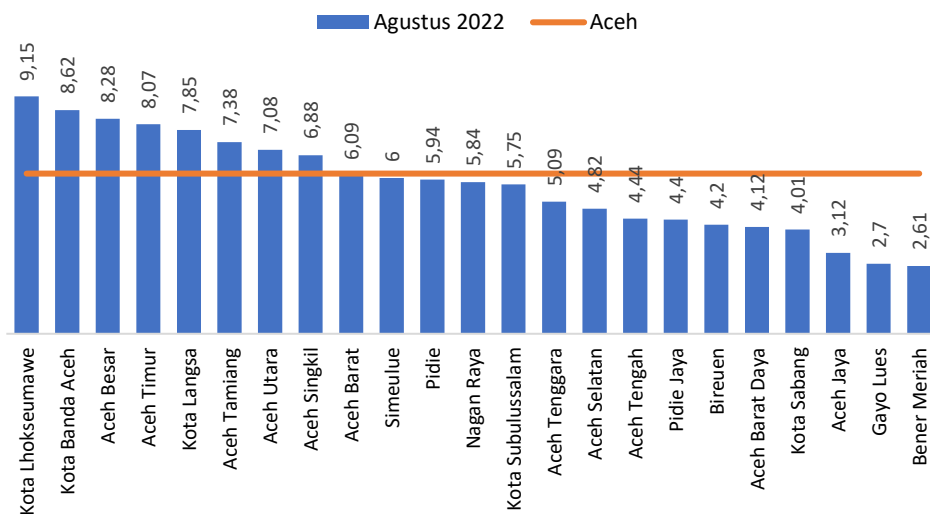
Sumber: BPS, diolah

Penurunan TPT Provinsi Aceh tidak lepas dari upaya kabupaten/kota dalam menekan TPT di daerahnya. Pada gambar 3.11 dapat dilihat bahwa capaian TPT pada Agustus 2022 kabupaten/kota di Provinsi Aceh cukup bervariasi. Pada Agustus 2022, Kota Lhokseumawe menjadi daerah yang memiliki TPT tertinggi, diikuti Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi Aceh mengalami penurunan TPT. Dengan capaian tersebut menunjukkan TPT di seluruh kabupaten/kota telah berada di bawah 10 persen atau *sigle digit*. Selain itu, sebagian besar kabupaten/kota atau sebanyak 15 daerah telah memiliki capaian TPT di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 6,17 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tersebut menunjukkan adanya tren yang membaik dari sisi penurunan angka pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

<sup>3</sup> BPS – membagi Status Pekerjaan Utama pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Aceh ke dalam 7 jenis, yaitu 1) berusaha sendiri; 2) berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; 3) berusaha dibantu buruh tetap; 4) buruh/karyawan/pegawai; 5) pekerja bebas di pertanian; 6) pekerja bebas di non pertanian; 7) pekerja keluarga/tak dibayar.

Di sisi lain adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang telah beroperasi sejak tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja khususnya untuk Kota Lhokseumawe yang memiliki TPT tertinggi. KEK Arun Lhokseumawe diproyeksikan dapat menarik investasi hingga 3,8 miliar USD dan menyerap lebih dari 40 ribu tenaga kerja hingga tahun 2027. Pada akhir tahun 2021, proyek pembangunan Pabrik NOK Chemical yang berada di KEK Arun juga diharapkan dapat segera selesai dan beroperasi. Dengan beroperasinya proyek senilai Rp 1,06 triliun ini dapat membantu untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Provinsi Aceh maupun Kota Lhokseumawe pada khususnya. Sementara itu, Kabupaten Bener Meriah yang berada di selatan Kota Lhokseumawe menjadi daerah dengan persentase jumlah penganggur terendah diikuti oleh Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Jaya.

**Gambar 3.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupate/ Kota Provinsi Aceh Tahun 2022 (Persen)**



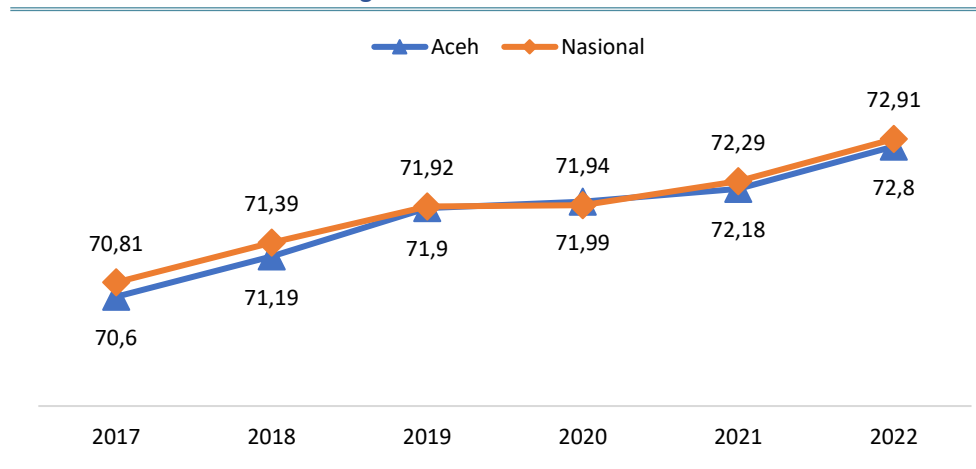
Sumber: BPS, diolah

#### 3.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat. Sepanjang tahun 2021 hingga 2022 kenaikan IPM di Provinsi Aceh mencapai 0,62 poin atau memiliki kenaikan yang sama dengan nasional. Namun peningkatan IPM Provinsi Aceh tersebut masih belum mampu mengejar capaian IPM nasional yang sedikit lebih tinggi 0,11 poin atau sebesar 72,91. Peningkatan IPM Provinsi Aceh pada tahun 2021 didorong oleh peningkatan seluruh komponen pembentuk IPM yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH) dan Pengeluaran Perkapita. Kendati masih berada pada situasi pandemi Covid-19,

seluruh komponen pembangunan manusia di Provinsi Aceh masih mampu menunjukkan kinerja yang membaik.

**Gambar 3.12 Perkembangan IPM Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2022**



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan komponen IPM, pertumbuhan IPM Provinsi Aceh pada tahun 2021 didorong oleh semua dimensi. Kendati mengalami kenaikan, namun pada Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan Pengeluaran Riil Perkapita (yang disesuaikan) Provinsi Aceh tahun 2022 masih berada di bawah nasional. Sementara komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Aceh tahun 2022 memiliki capaian yang lebih baik dibandingkan nasional. Dilihat dari perubahannya selama 5 tahun terakhir, komponen UHH, RLS, dan HLS Aceh masih memiliki tingkat perubahan kumulatif yang lebih rendah dibandingkan nasional, sebaliknya pada komponen Pengeluaran Perkapita memiliki tingkat perubahan yang lebih besar dibandingkan nasional.

**Tabel 3.1 Komponen Pendukung IPM**

Dimensi	Indikator	Capaian 2021		Capaian 2022	
		Aceh	Nasional	Aceh	Nasional
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	69,96	71,57	70,18	71,85
Pengetahuan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,36	13,08	14,37	13,1
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,37	8,54	9,44	8,69

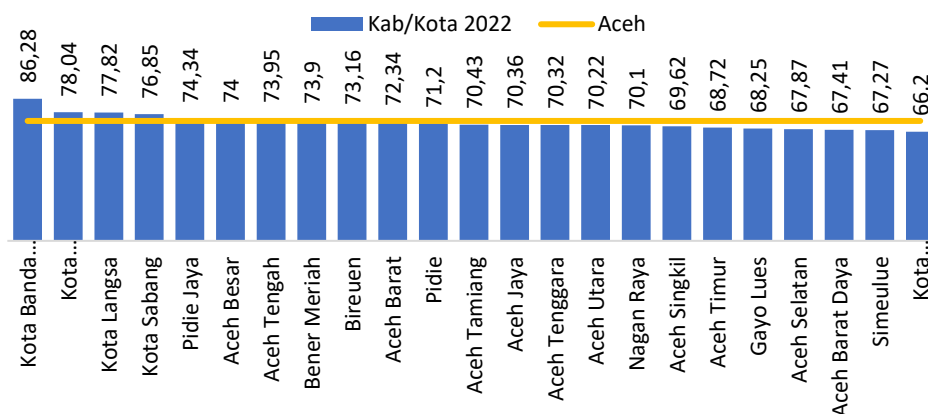
Dimensi	Indikator	Capaian 2021		Capaian 2022	
		Aceh	Nasional	Aceh	Nasional
Standar Hidup Layak	Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) (Rp000)	9.572	11.156	9.963	11,479

Sumber: BPS, diolah

Capaian IPM Provinsi Aceh tidak terlepas dari capaian IPM di kabupaten/kota. Pada tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh cukup bervariasi. IPM tertinggi berada pada Kota Banda Aceh sebesar 86,28 diikuti dengan Kota Lhokseumawe (78,04) dan Kota Langsa (77,82). Sebaliknya, IPM terendah berada pada Kota Subulussalam sebesar 66,2 diikuti Kabupaten Simeulue (67,27) dan Kabupaten Aceh Barat Daya (67,41). Kota Banda Aceh juga menjadi kabupaten/kota dengan capaian IPM terbesar kedua se-Indonesia atau berada di bawah Kota Yogyakarta yang berada di peringkat satu nasional. Ini menunjukkan kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kota Banda Aceh mampu mengungguli kota-kota besar lainnya seperti Kota Jakarta Selatan, Kendari dan Denpasar. Sementara pada peringkat 5 terbawah didominasi oleh daerah pada level daerah kabupaten. Ini artinya pembangunan kualitas SDM di Provinsi Aceh masih belum merata terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Adapun jumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan status capaian IPM selama satu tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan. Sebanyak 15 kabupaten/kota memiliki status capaian IPM dengan kategori ‘tinggi’ atau naik dari tahun lalu yang hanya 10 kabupaten/kota. Sedangkan 7 kabupaten/kota masih berstatus “sedang” dan hanya satu kota yang berstatus “sangat tinggi”.

**Gambar 3.13 Pencapaian IPM Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022**



Sumber: BPS, diolah

### 3. 2. Skoring Kinerja Pencapaian

Berdasarkan hasil capaian kinerja Provinsi Aceh pada tahun 2022, analisis skoring dilakukan dengan membandingkan capaian tahun 2022 dengan sasaran pada RKP 2022 dan RKPD 2022, serta realisasi capaian pada 2021. Pada perbandingan dengan RKP 2022, hanya ada tiga indikator yang diperbandingkan yakni laju pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat kemiskinan (TK), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berdasarkan capaian kinerja, Provinsi Aceh mendapatkan total skor 9 dari nilai maksimal 9, jika dibandingkan dengan sasaran pada RKP 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian target dari ketiga indikator tersebut sudah sangat baik. Dari nilai skor, baik LPE, TK, dan TPT mendapatkan skor poin 3. Jika dilihat lebih detail, capaian kinerja LPE dan TK sudah mampu melebihi target, sedangkan TPT hanya sedikit di bawah target.

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Provinsi Aceh terhadap Target RKP 2022**

Indikator	Capaian 2022	Indikator Pembanding								
		Sasaran RKP 2022			Sasaran RKPD 2022			Realisasi 2021		
		Target	Capaian Kinerja	Skor	Target	Capaian Kinerja	Skor	Capaian 2021	Capaian Kinerja	Skor
LPE (%)	4,21	3,74	113%	3	4,7	90%	2	1,24	0,509	3
TK (%)	14,75	15,0	102%	3	13,43	90%	3	15,53	0,050	3
TPT (%)	6,17	6,11	99%	3	5,6	90%	2	6,3	0,021	1
RG	0,291	-	-	-	0,3	103%	3	0,323	0,099	3
IPM	72,8	-	-	-	72,58	100%	3	72,18	0,009	2
Skor Akhir		9/9			13/15			12/15		
		*91								

Sumber: Hasil EKPD 2022

\*) = Skor akhir merupakan akumulasi total skor yang sudah diberi bobot penilaian

Pada skoring capaian kinerja dengan sasaran RKPD tahun 2022, terdapat dua tambahan indikator yang dinilai yakni rasio gini dan IPM. Berdasarkan hasil skoring, total nilai yang diperoleh Provinsi Aceh sebesar 13 dari 15 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian target dari kelima indikator tersebut sudah sangat baik dengan dengan sasaran RKPD 2022 yang telah ditentukan. Dari kelima indikator di atas, Provinsi Aceh sudah mencapai target yang diharapkan pada RKPD 2022 kecuali indikator tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara dari skoring capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 melalui skoring delta, kinerja Provinsi Aceh mendapatkan total skor 12 dari 15. Terdapat 3

indikator yang mendapatkan skor tinggi yaitu pada indikator LPE, TK, dan Rasio Gini yang memiliki capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada indikator TPT mendapatkan poin 1 atau memiliki realisasi kinerja yang rendah dibandingkan tahun 2021, sedangkan pada indikator IPM memiliki capaian pada tahun 2022 yang sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

### 3.3. Analisis Faktor Pendukung

#### a. Komponen Sumber Daya Daerah

Dalam aspek Modalitas Daerah, terdiri dari komponen Sumber Daya Daerah, Partisipasi *Stakeholders*, serta Kelembagaan dan Tata Kelola. Komponen Sumber Daya Daerah terbagi menjadi dua dimensi, yaitu Geografis dan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sosial Budaya. Indikator eksisting yang digunakan untuk mengukur dimensi Geografis dan SDA adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indikator IKTL dapat menjelaskan bagaimana kualitas tutupan lahan di sebuah provinsi, dengan membandingkan luas hutan dengan total luas wilayah administratif di provinsi tersebut. Dengan indikator ini, kita dapat melihat bahwa suatu daerah memiliki wilayah hijau yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.

Indikator lainnya yang termasuk ke dalam Dimensi Geografis dan SDA adalah Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Proporsi PDRB sektor primer terhadap total PDRB. IRBI berguna untuk melihat seberapa besar risiko sebuah daerah terhambat pembangunan ekonominya dikarenakan oleh gangguan bencana. Sementara itu, Proporsi PDRB sektor primer berguna untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi sebuah daerah bergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya.

Dimensi Sosial Budaya dijelaskan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), risiko penduudk terkena kejahatan per 100.000 penduduk, dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indikator IDI dapat mencerminkan faktor-faktor dalam isu sosial budaya yang dapat menghambat sebuah daerah untuk berkembang. Perbandingan tingkat daya saing daerah dijelaskan oleh indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dapat mencerminkan faktor-faktor apa saja yang menjadi ukuran sebuah daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya. Tabel di bawah ini merupakan hasil skor komponen sumber daya daerah untuk Provinsi Aceh.

**Tabel 3.3 Skor Komponen Sumber Daya Daerah**

Dimensi	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Dimensi
Geografis & SDA	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	76,52	0,68	0,50
	Proporsi PDRB Sektor Primer	0,367	0,68	



Dimensi	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Dimensi
	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	150,0	0,14	
Sosial Budaya	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	80,92	0,93	0,75
	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	149	0,6	
	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,992	0,72	

Sumber: Penulis

Provinsi Aceh pada tahun 2022 memiliki skor dimensi Geografis dan SDA sebesar 0,5 dan skor dimensi Sosial Budaya sebesar 0,75. Capaian IKTL Provinsi Aceh sebesar 76,5. Selain itu, untuk proporsi PDRB sektor primer sebesar 0,37 dan IRBI sebesar 147,4. Pada Dimensi Sosial Budaya, IDI Provinsi Aceh mencapai 80,92, Risiko penduduk terkena kejahatan per 100 ribu penduduk mencapai angka 149, dan IDSD sebesar 2,99. Angka capaian tersebut kemudian dinormalisasi sehingga dapat dibandingkan satu sama lain. Dari sisi Modalitas Daerah, dimensi Sosial Budaya menjadi faktor dengan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan dimensi Geografis dan SDA. Provinsi Aceh memiliki modal sosial dan budaya yang kuat yang didorong oleh skor IDI yang lebih tinggi, daerah yang relatif aman dari kejahatan, serta memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain.

#### b. Komponen Partisipasi *Stakeholders*

Pemerintah daerah perlu melakukan sinergi dengan seluruh *stakeholders* untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan secara maksimal. Partisipasi aktor nonpemerintah yang tinggi dapat memberikan masukan atas strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang lebih baik sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengukur partisipasi *stakeholders* dalam pembangunan daerah, evaluasi ini membagi komponen tersebut ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi Partisipasi dan dimensi Investasi.

Dimensi Partisipasi mengukur derajat peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Indikator yang digunakan adalah tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu terakhir, partisipasi sosial (bagian dari Indeks Kebahagiaan), persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (IPP), dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (IPP). Keempat indikator ini memiliki fungsi utama untuk menggambarkan partisipasi masyarakat pada umumnya dan pemuda pada khususnya dalam menciptakan kondisi daerah yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, dimensi Investasi mengukur derajat peran serta sektor swasta dalam pembangunan daerah. Indikator yang digunakan adalah total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta pertumbuhan PMA dan



PMDN. Kedua indikator tersebut menggambarkan bagaimana partisipasi sektor bisnis baik domestik maupun internasional dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pembangunan di daerah. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan tabel di bawah, terlihat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu terakhir mencapai 82 dari 100 persen, partisipasi sosial mencapai 71,24 dari 100 persen, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (IPP) 100,7 dari 100 persen, dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (IPP) mencapai 68,87 dari 100 persen. Tabel di bawah memberikan informasi lebih detail mengenai skoring modalitas daerah komponen partisipasi *stakeholders*.

**Tabel 3.4 Skor Komponen Partisipasi Stakeholders**

Dimensi	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Dimensi
Partisipasi	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu atau pilkada terakhir	82,0	0,22	0,39
	Partisipasi Sosial	71,24	0,38	
	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (IPP)	1,076	0,80	
	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (IPP)	0,687	0,14	
Investasi	Realisasi PMA dan PDMN (Triliun Rp)	5,36	0,03	0,05
	Pertumbuhan PMA dan PMDN (%)	-37,38	0,07	

Sumber: Penulis

Hasil skoring atas indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa capaian makro Provinsi Aceh tahun 2022 belum ditopang oleh keterlibatan peran swasta yang saat ini masih relatif rendah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perekonomian Provinsi Aceh juga cenderung rendah relatif terhadap provinsi-provinsi lain.

### c. Komponen Kelembagaan dan Tata Kelola Daerah

Selain sumber daya dan partisipasi, aspek kelembagaan dan tata kelola daerah juga memiliki peran penting dalam menentukan capaian pembangunan suatu daerah. Kelembagaan dan tata kelola yang baik akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi di suatu daerah sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencapaian indikator makro lain. Untuk mengukur kualitas kelembagaan dan tata kelola, evaluasi ini menggunakan dimensi Fiskal dan dimensi Institusi.

Dimensi Fiskal diukur melalui indikator Rasio Realisasi Pendapatan Daerah terhadap APBD, Rasio Realisasi PAD terhadap PDRB (*local tax ratio*), dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD). Indikator Rasio Realisasi Pendapatan Daerah terhadap APBD digunakan untuk menangkapi kemampuan Pemerintah Daerah dari sisi sumber daya keuangan dalam membiayai program/kegiatan yang direncanakan. Indikator Rasio Realisasi PAD terhadap PDRB digunakan untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan mereka sendiri untuk membiayai program/kegiatan. Sementara indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) mengukur seberapa besar kemampuan daerah untuk membiayai program/kegiatan yang dapat menstimulus perekonomian daerah.

Dimensi Kelembagaan dan Tata Kelola diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan nilai kepatuhan standar pelayanan publik. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas sebagai salah satu modalitas pembangunan daerah. Dengan melihat Opini BPK atas LKPD, kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dapat diukur. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal juga dapat terlihat dari indikator ini. Sementara indikator nilai kepatuhan standar pelayanan publik berguna untuk menilai apakah sebuah daerah melakukan pelayanan publik dengan baik dan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku. Standar pelayanan publik merupakan hal dasar yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara pelayanan publik. Daerah dengan pelayanan publik yang baik seharusnya memiliki kondisi yang lebih kondusif bagi investasi dibandingkan dengan daerah yang kurang baik. Tabel di bawah memberikan informasi lebih detail mengenai skoring modalitas daerah komponen kelembagaan dan tata kelola daerah.

**Tabel 3.5 Skor Komponen Kelembagaan dan Tata Kelola Daerah Provinsi Aceh**

Dimensi	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Dimensi
Fiskal	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran APBD	0,90	0,44	0,40
	Rasio PAD terhadap PDRB ( <i>Tax Ratio</i> )	0,028	0,74	
	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	0,303	0,01	
Institusi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	63,4	0,33	0,68



Dimensi	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Dimensi
	Opini BPK atas LKPD	5	1,0	
	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	83,360	0,72	

Sumber: Penulis

Capaian rasio realisasi belanja terhadap anggaran APBD Provinsi Aceh adalah 0,90 (90 persen), Rasio PAD terhadap PDRB adalah 0,028 (2,8 persen), dan nilai IKFD sebesar 0,303. Selanjutnya, IRB menunjukkan capaian sebesar 63,4. Provinsi Aceh memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali dalam lima tahun terakhir, serta nilai kepatuhan standar pelayanan publik sebesar 83,36.

Dari sisi fiskal, Provinsi Aceh dapat dikatakan masih perlu meningkatkan efektifitas dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja daerah sesuai dengan APBD. Hal ini tercermin dari skor indikator tersebut yang masih relatif rendah sebesar 0,44. Selain itu, dukungan dari sisi rasio pajak sudah cukup baik, meski dari sisi kapasitas fiskal yang masih cenderung lemah. Dari sisi institusi, ketiga indikator memberikan indikasi bahwa kelembagaan dan tata kelola daerah di Provinsi Aceh sudah cukup baik.

### 3. 4. Hasil Skoring Faktor Pendukung

Hasil agregasi atas skor indikator, skor dimensi, dan skor komponen digunakan sebagai basis menghitung skor Faktor Pendukung. Skor Faktor Pendukung Provinsi Aceh pada tahun 2022 adalah 48. Berdasarkan tiga komponen pembentuknya, skor komponen Sumber Daya Daerah memperoleh skor tertinggi, disusul komponen Tata Kelola Daerah, dan komponen Partisipasi *Stakeholders*. Dengan demikian, faktor sosial budaya serta kualitas institusi yang memiliki peran dalam menopang capaian kinerja makro Provinsi Aceh di tahun 2022.

**Tabel 3.6 Agregasi Skoring Indikator Faktor Pendukung Provinsi Aceh**

Dimensi	Skor Dimensi	Komponen	Skor Komponen	Faktor Pendukung	Skor Faktor Pendukung
Geografis dan SDA	0,50	Sumber Daya Daerah	0,62	Faktor Pendukung	0,48 * 100 = 48
Sosial Budaya	0,75				
Partisipasi	0,39	Partisipasi <i>Stakeholders</i>	0,22		
Investasi	0,05				

Dimensi	Skor Dimensi	Komponen	Skor Komponen	Faktor Pendukung	Skor Faktor Pendukung
Fiskal	0,40	Tata Kelola Daerah	0,54		
Institusi	0,68				

Sumber: Penulis

### 3. 5. Analisis Deskriptif Dukungan Daerah

Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional maupun sasaran pembangunan daerah, tidak terlepas dari kontribusi atau dukungan daerah. Pada kegiatan EKPD tahun 2022 ini, telah dilakukan pemetaan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran makro daerah dan juga terhadap tujuh Prioritas Nasional. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (2022), alokasi APBD Provinsi Aceh paling tinggi untuk mendukung pencapaian indikator IPM yaitu sebesar 43,24 persen diikuti indikator tingkat kemiskinan sebesar 40,93 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 25,46 persen. Hal ini menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dari Pemerintah Provinsi Aceh untuk meningkatkan IPM, penurunan tingkat kemiskinan, dan mengurangi angka pengangguran. Sementara itu, alokasi dukungan daerah terhadap tujuh prioritas nasional yaitu pada PN 3 “Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing” sebesar 40,25 persen diikuti dukungan pada PN 4 “Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan” sebesar 25,94 persen.

### 3. 6. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2022, laporan ini mengidentifikasi sejumlah isu strategis/permasalahan pembangunan di Provinsi Aceh. Pertama, meski mengalami perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi, namun pada sektor pertanian mengalami kontraksi. Penurunan kinerja ini perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat sektor pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian daerah baik dari sisi kontribusi PDRB maupun dari sisi serapan tenaga kerja. Kedua, peran investasi swasta diharapkan dapat mengakselerasi perekonomian daerah, namun jika dilihat berdasarkan rasio PMA dan PMDN di Provinsi Aceh masih tergolong rendah. Ketiga, angka kemiskinan daerah yang masih tinggi terutama di wilayah perdesaan. Sementara angka kemiskinan di wilayah perkotaan justru menunjukan adanya peningkatan. Keempat, hilirisasi industri pengolahan yang masih belum optimal. Hilirisasi dari komoditas unggulan berbasis sumber daya alam seperti pertanian, pertambangan, dan maritim diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian Provinsi Aceh ke depan. Kelima, penduduk bekerja di Provinsi Aceh masih didominasi oleh pekerja di sektor informal. Selain itu, pada Agustus 2022, penduduk bekerja juga masih didominasi oleh pekerja dengan lulusan SD ke bawah.





# **BAB IV**

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**





**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

- Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama tahun 2022 tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 4,21 persen (*c-to-c*). Namun tumbuh lebih rendah dibandingkan nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh didorong oleh pertumbuhan hampir seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi serta lapangan usaha Konstruksi yang tumbuh negatif.
- Angka kemiskinan di Provinsi Aceh terus menunjukkan tren yang menurun, meski sempat mengalami kenaikan angka kemiskinan pada periode September 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Walaupun terus menunjukkan kinerja yang membaik dari sisi penurunan angka kemiskinan, namun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Sumatera, angka kemiskinan Provinsi Aceh masih menjadi yang tertinggi.
- Pasca pandemi Covid-19 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Aceh terus mengalami penurunan. Penurunan TPT di Provinsi Aceh tidak terlepas dari serapan tenaga kerja di beberapa sektor. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Aceh, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
- Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran daerah, kondisi ketimpangan di Provinsi Aceh juga memperlihatkan kondisi yang semakin membaik. Pada periode Maret 2022, rasio gini Provinsi Aceh menjadi yang terendah selama 5 tahun terakhir.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh dari tahun 2017 hingga 2022 terus menunjukkan tren yang meningkat. Indeks pembangunan manusia tahun 2022 tercatat sebesar 70,6. Pembangunan manusia di Provinsi Aceh pada tahun 2022 mengalami akselerasi yang ditandai oleh pertumbuhan IPM sebesar 0,62 poin. Namun demikian, IPM Aceh masih berada sedikit di bawah nasional.
- Sepanjang tahun 2022, Provinsi Aceh berhasil mencatatkan kinerja makro yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan antara capaian indikator makro dengan target baik RKP kewilayahan. Hanya satu indikator yang belum mencapai target yaitu tingkat LPE. Selain itu, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian 2022 mengalami perbaikan kinerja.
- Hasil analisis terhadap Faktor Pendukung mengindikasikan bahwa capaian kinerja makro Provinsi Aceh ditopang oleh aspek Sumber Daya Daerah dan Tata Kelola Daerah.



Sementara, peran komponen Partisipasi *Stakeholders* relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain.

#### 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi bagi pembangunan daerah Provinsi Aceh sebagai berikut:

- Pemerintah daerah Aceh perlu merancang suatu program pengembangan agroindustri yang konkrit dengan memanfaatkan tanaman pangan unggulan di wilayah potensial
- Penyusunan strategi yang holistik dan integratif terkait pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti jagung, kopi, pala dan perikanan
- Penguatan kemitraan usaha antarwilayah dalam upaya pengembangan program multisektor
- Pemerintah Aceh perlu membuat *roadmap* terkait kerjasama dengan swasta dalam pengembangan kawasan strategis
- Penguatan koordinasi dalam pembangunan antardaerah khususnya Provinsi Sumatera Utara terkait pengembangan kawasan di sekitar jalan tol Trans Sumatera
- Penguatan sarana prasarana kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitas konektivitas, fasilitas pendidikan dan kesehatan
- Memperluas kemitraan dagang antardaerah dalam upaya peningkatan pangsa pasar produk unggulan daerah
- Perlunya koordinasi dengan K/L terkait dalam upaya percepatan realisasi KEK Arun dengan terus melakukan koordinasi dengan calon investor khususnya bagi para *stakeholders* atau anggota konsorsium yang telah berkomitmen dalam penyertaan modal. Sedangkan untuk KIA Ladong pemerintah Provinsi Aceh perlu mempersiapkan *masterplan* dan alokasi anggaran dalam mempersiapkan fasilitas pendukung kawasan
- Pemerintah Aceh perlu melengkapi fasilitas sarana prasarana di daerah destinasi wisata unggulan daerah dan perlu adanya tindak lanjut koordinasi bagi para calon investor khususnya dari UAE dalam pengembangan destinasi wisata Pulau Banyak.

**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**





Evaluasi Kinerja  
Pembangunan  
Daerah 2022



[dit.peppdbappenas](https://www.instagram.com/dit.peppdbappenas)



Direktorat PEPPD



[peppd.bappenas.go.id](http://peppd.bappenas.go.id)



**Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan  
Pengendalian Pembangunan Daerah**

**Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi,  
dan Pengendalian Pembangunan**

Gedung Bappenas Lantai 9  
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan  
Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 12920



**Phone**

Cell: (021) 31936207



**Email & Online**

Email: [dit.peppd@bappenas.go.id](mailto:dit.peppd@bappenas.go.id)